

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) yang dibentuk tahun 1975, diharapkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai organisasi yang selalu mendukung kepentingan-kepentingannya serta membantu menyukseskan program dan berbagai kebijakan-kebijakannya. MUI didirikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan umat Islam secara perseorangan dan secara organisasi mengenai soal-soal keagamaan khususnya, dan soal-soal masyarakat pada umumnya.

Namun, dalam pelaksanaannya MUI mengalami tantangan dalam merealisasikan itu semua. Di satu sisi mereka harus menjalankan lembaga ini seperti yang diharapkan pemerintah, namun disisi lain tokoh-tokoh ulama yang menjadi petinggi MUI adalah tokoh-tokoh Islam progresif yang menginginkan MUI sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, meluruskan pemahaman tentang modernisasi, menjaga kepentingan umat Islam Indonesia, serta sebagai penyampai aspirasi umat kepada pemerintah.

Selain itu, MUI dituntut pula untuk bisa menjadikan Islam sebagai agama yang mampu menjawab tantangan zaman, lebih profesional, mampu memberikan solusi praktis tidak hanya normatif dalam menghadapi masalah sosial masyarakat Indonesia, serta mendukung proses modernisasi dan pembangunan, tanpa tuntutan

dan tantangan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, MUI juga dituntut untuk menggunakan strategi perjuangan dari politik yang bersifat oposisional; ke non-politik yang bersifat akomodasional (Suwirta. 2005: 118). Dengan demikian, MUI menghadapi tantangan dari pemerintah dan masyarakat agar Islam mengalami proses modernisasi dan reaktualisasi. Tuntutan dan tantangan itu harus dijawab oleh MUI, sebagai lembaga yang mencoba menjadi representatif umat Islam, tanpa harus meninggalkan penafsiran-penafsiran Islam yang fundamental.

Syafi'i Anwar (<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=861>) berpendapat Kelahiran MUI memang tidak bisa lepas dari konteks historis dan politik ketika itu. Konteks historisnya adalah mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah Orde Baru yang melihat masa-masa sebelumnya penuh gejolak politik. Pada waktu itu ada kelompok yang bernama "Komando Jihad" dan kelompok-kelompok lain yang dinilai Orde Baru sebagai organisasi Islam ekstrim karena tujuannya adalah untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Dengan demikian, berdirinya MUI harus dilihat dalam konteks historis tersebut. Secara politik, pemerintah Orde Baru sangat menginginkan suasana yang aman dan kondusif, sementara beberapa kelompok umat Islam di masa itu sering dianggap ekstrim kanan yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Stigmatisasi "Ektrim Kanan" bukan hanya ditujukan pada kelompok Komando Jihad, namun juga lebih banyak diarahkan pada organisasi-organisasi Islam yang bersebrangan atau tidak mendukung kebijakan-kebijakan Orde Baru. Kondisi seperti itu menimbulkan situasi saling mencurigai antara pemerintah dan umat Islam.

Melihat kondisi tersebut, perlu suatu wadah yang mampu menjembatani antara pemerintah dan umat Islam, dan di sanalah MUI diharapkan berperan.

Pemerintah tidak meminta NU dan Muhammadiyah sebagai jembatan, karena pemerintah sadar betul kalau meminta peran itu langsung kepada NU dan Muhammadiyah akan dianggap intervensi. Oleh karena itulah pembentukan MUI dalam beberapa hal dapat disebut sebagai pembentukan lembaga kuasi pemerintah yang berdampak MUI tidak pernah bisa lepas dari kepentingan pemerintah. Hal tersebut merupakan fakta objektif yang tidak bisa dikesampingkan.

Berbeda dengan Syafi'i Anwar, Atho Mudzhar (2001:242-249) ketika menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan MUI mengalami kemunduran, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran MUI adalah faktor kepemimpinan dan kurangnya orang-orang progresif di dalam tubuh MUI. MUI pada masa kepemimpinan Hamka berjalan dengan cukup baik, salah satunya dengan produktifitas dalam mengeluarkan fatwa yang cukup tegas dan berani, baik yang bertentangan dengan kehendak pemerintah, maupun masyarakat umumnya (Mudzhar,2001: 243). Dengan demikian, asumsi MUI hanya sebagai penerjemah dan corong pemerintah tidak sepenuhnya tepat, khususnya ketika pada masa kepemimpinan Hamka, karena seperti yang diungkapkan oleh Djohan Efendi, bahwa pemerintah mendirikan MUI seperti memelihara "anak macan" ([http:// islamlib.com /id /index. php? page=article & id=861](http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=861)). Pendapat tersebut menunjukkan penilaiannya terhadap MUI yang berusaha untuk menjadi lembaga Independen dari pengaruh pemerintah dan membuktikan bahwa lembaga yang merupakan wadah ulama tersebut memiliki fungsi yang kuat sebagai pengontrol

sosial, tidak seperti pemahaman selama ini yang menganggap MUI sebagai kaki tangan pemerintah dan alat menjinakan para ulama saja. Meskipun demikian, pendapat tersebut bukan berarti menegasikan pengaruh pemerintah terhadap MUI.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, MUI telah mengalami tiga kali pergantian Ketua Umum yaitu Hamka (1975-1981), KH Syukri Ghozali, (1981-1984), dan KH Hasan Basri (1984-1998). Ketiga Ketua Umum ini memiliki karakter serta gaya kepemimpinan yang berbeda dan khas, sehingga sangat menarik bagi kita untuk membandingkannya terutama dalam skripsi ini lebih difokuskan pada bagaimana Ketua Umum MUI ini menyikapi masalah-masalah sosial dan politik pada masa Orde Baru.

Setiap Ketua Umum MUI menghadapi masalah-masalah sosial politik yang berbeda-beda, namun ada permasalahan yang harus dihadapi MUI selama beberapa periode kepemimpinan seperti masalah asas tunggal Pancasila, liberalisme Islam, UU yang dinilai bertentangan dengan Islam (perkawinan, waris dan Pendidikan) dan aliran-aliran Islam yang dinilai MUI menyimpang.

Perbandingan pola kepemimpinan ketua MUI ini bukan dimaksudkan mencari mana yang lebih baik dari yang lain, namun semuanya ditujukan untuk meneliti cara-cara yang digunakan mereka dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi MUI dalam bidang sosial politik. Banyak pihak yang menilai bahwa MUI hanya mampu independen pada masa kepemimpinan Hamka, sementara setelah Hamka Wafat, MUI nyaris hanya menjadi lembaga yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Anggapan seperti itu nampaknya sangat mengecilkan atau boleh dikatakan meremehkan kepemimpinan MUI pasca

Hamka yang dipegang oleh KH Syukri Ghozali, (1981-1984) dan KH Hasan Basri (1984-1998).

Skripsi ini mencoba menganalisis kebenaran dari anggapan umum tersebut dan diharapkan bisa membuktikan bahwa MUI adalah lembaga yang berusaha untuk independen dan memposisikan dirinya sebagai penjaga umat Islam serta berusaha untuk menjadi lembaga penyampai aspirasi umat Islam pada pemerintahan Orde Baru atau malah sebaliknya, MUI memang selalu berada di bawah kendali pemerintah. Dengan demikian, kita bisa menganalisisnya untuk mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan hal itu sampai terjadi, mengapa pada suatu waktu MUI bersikap independen dan menentang kebijakan pemerintah, namun diwaktu yang lain MUI menjadi lembaga yang begitu dekat dengan pemerintah dan pendukung utama berbagai kebijakannya.

Selama kepemimpinan Hamka, MUI memiliki hubungan yang dikatakan rumit dengan pemerintah. Pemerintah sangat mendukung dan menjadi penggagas pembentukan MUI, dukungan itu salah satunya dapat dilihat dari kucuran dana dari pemerintah kepada lembaga ini. Dalam perjalanannya, pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengendalikan MUI dan menjadikannya sebagai lembaga yang melegitimasi kebijakan-kebijakannya. Hal tersebut sudah disadari lebih dahulu oleh Hamka, maka wajar, pada awalnya beliau enggan untuk menjadi ketua MUI. Namun, pada akhirnya Hamka menerima jabatan sebagai ketua MUI dengan beberapa alasan yaitu *pertama*, pemerintahan Soeharto merupakan pemerintahan anti komunis, dan Islam pun anti komunis, maka bekerjasama dengan pemerintah untuk melawan komunis merupakan suatu kebutuhan, disamping Ideologi

Komunis hanya bisa dikalahkan oleh ideologi yang lebih kuat yaitu Islam. *Kedua*, untuk menghindari upaya dari pemerintah dalam memodernisasi rakyat Indonesia yang sebagian besar muslim yang dinilainya lebih mengarah pada westernisasi dan sekuler.

Hamka dalam hubungannya dengan pemerintah Orde Baru, berusaha untuk membantu pemerintah jika sejalan dengan kepentingan umat Islam, dan berusaha untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam. Tindakan tersebut dapat dilihat dari apa yang dilakukan Hamka yang mendatangi Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1975 yang meminta Soeharto untuk melindungi umat Islam dari proses kristenisasi. Permintaan tersebut memang tidak segera ditanggapi oleh pemerintah, Baru pada masa menteri Agama Alamsjah, permintaan MUI itu ditanggapi dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah tentang aturan pembatasan penyiaran dan penyebaran agama, serta kewajiban permintaan izin bagi bantuan asing yang diperuntukan bagi lembaga keagamaan di Indonesia. Peraturan tersebut mengundang reaksi keras dari umat Kristen, namun disambut gembira oleh kalangan muslim.

Pertentangan antara pemerintah dan MUI terjadi ketika munculnya fatwa larangan untuk mengucapkan selamat natal dan menghadiri perayaannya. Fatwa tersebut mengundang pro dan kontra yang luas dikalangan masyarakat, yang menyebabkan pemerintah mendesak MUI untuk mencabut fatwa tersebut. Hamka tetap bersikukuh untuk tidak mencabut fatwa tersebut dan memilih untuk mundur.

Hubungan pemerintah dengan MUI, selain melalui jalan eksekutif, juga terjalin salah satunya dengan ABRI. MUI menyadari bahwa peranan ABRI pada

pemerintahan Orde Baru sangat besar, bahkan mendominasi. Oleh karena itu, demi menjaga kepentingan umat Islam, yang semenjak pemberontakan DI/TII terus dicurigai, maka MUI di bawah Hamka menjalin hubungan dengan ABRI dengan membentuk Komunikasi Sosial (KOMSOS), yang pada perjalanannya berhasil untuk menghilangkan stigmatisasi "*Komando Jihad*" yang berkonotasi negatif bagi kelompok-kelompok Islam radikal. Penjelasan tersebut menggambarkan prinsip MUI selama dipegang Hamka, yaitu berusaha untuk berhubungan baik dengan pemerintah, namun disisi lain tetap berusaha untuk menjaga kepentingan dan kemurnian akidah umat Islam Indonesia.

Kepemimpinan MUI setelah Hamka mengundurkan diri dipegang oleh KH Syukri Ghozali. Syukri Ghozali memimpin MUI dari tahun 1981 hingga 1984. Beliau mempunyai karakter yang berbeda dengan Buya Hamka yang pandai berpidato. Beliau terkenal sebagai sosok yang pendiam dan berpenampilan tenang. Namun, di balik sikap pendiamnya tersebut, Syukri Ghozali menyimpan sifat yang tegas pula. Pada masa kepemimpinannya, paham Ingkar Sunah yang menyebar di tengah masyarakat berhasil dihentikan kegiatan dan pengaruhnya dengan dimunculkan fatwa sesat bagi kelompok tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kemarahan dikalangan penganut paham liberal yaitu Teguh Esha, Nazwar Syamsu, Djohan Efendi dan Dawam Rahardjo.

KH Syukri Ghozali meninggal pada bulan September 1984, maka secara otomatis yang menjadi Ketua Umum MUI adalah wakilnya yaitu KH Hasan Basri. KH Hasan Basri menjadi Ketua Umum resmi semenjak Munas MUI tahun 1985, dan memimpin hingga beliau meninggal tahun 1998. Pemerintahan Orde Baru di

bawah Soeharto tidak terlalu menyukai KH Hasan Basri menjadi Ketua Umum MUI, karena ulama asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal sebagai orang keras. Selain itu beliau pernah menjadi petinggi Masyumi, artinya KH Hasan Basri dikenal oleh Soeharto sebagai politikus Islam. Soeharto tidak menginginkan tokoh partai Politik untuk menjadi Ketua Umum MUI, karena ditakutkan MUI akan dipolitisi untuk kepentingan partainya. Namun, para petinggi MUI mampu meyakinkan Soeharto bahwa KH Hasan Basri sudah meninggalkan dunia politiknya tersebut.

Pada masa kepemimpinannya banyak masalah-masalah yang harus dihadapi seperti masalah pencetus asas tunggal Pancasila oleh Orde Baru, serta munculnya undian berhadiah yang bernama Porkas dan SDSB (Sumbangan Dana Sukarela Berhadiah) yang dinilai ulama mengandung unsur judi. Pada masa Hasan Basri, terjadi pertentangan sengit antara MUI dengan Menteri Agama Munawir Sjadzali yang bersikeras mau mengubah hukum waris Islam, agar wanita bagiannya sama dengan laki-laki. Seperti Hamka yang harus menghadapi aliran Ahmadiyah yang dinilai menyimpang, serta pada masa Syukri Ghazali yang harus berhadapan dengan paham ingkar sunah, Hasan Basri pun harus menghadapi aliran yang dinilai menyimpang yaitu Darul Arqom.

Dalam hubungannya dengan organisasi lain, MUI berusaha untuk diterima baik oleh organisasi Islam dan Non-Islam maupun masyarakat Islam itu sendiri. MUI yang merupakan wadah gabungan organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang di dalamnya terdapat wakil-wakil dari berbagai organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad dan berbagai organisasi Islam lainnya. Selain

itu, MUI berusaha mewadahi berbagai pemikiran Islam yang berkembang saat itu baik pemikiran konservatif maupun modernis.

MUI dalam perkembangannya, khususnya pada masa Hamka berusaha menjalin hubungan baik dengan berbagai organisasi yang ada, salah satunya dengan kunjungan rutin, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh mereka. MUI sendiri sering mengundang berbagai organisasi Islam untuk hadir dalam acara yang diselenggarakannya. Organisasi Islam yang lain memang menghendaki keberadaan MUI itu kuat, namun tidak menginginkan organisasi Baru ini untuk mengambil alih posisi dan massa organisasinya yang mereka nilai telah berdiri lebih dahulu sebelum MUI.

Menghadapi hal itu, MUI berusaha untuk tidak mengganggu eksistensi organisasi yang telah *eksis* terlebih dahulu, apalagi mengambilalih kedudukan dan massa pendukungnya. Dan memang, MUI hanyalah lembaga yang bertugas memberikan *Tausyiah* dalam bentuk fatwa-fatwa khusus, dan tidak menceburkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan praktis maupun dengan mengadakan program pengkaderan.

Sementara itu, mengenai hubungan MUI dengan organisasi non-muslim, tidak mengalami banyak masalah kecuali dengan organisasi-organisasi Kristen. Hal tersebut disebabkan oleh sikap Ketua Umumnya yaitu Hamka, yang sangat keras menentang kristenisasi. Pertentangan itu pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal pada saat MUI mengeluarkan fatwa larangan kaum muslimin menghadiri perayaan natal.

Penelitian mendalam tentang lembaga MUI baik dari segi proses pengambilan kebijakan, orang-orang yang membantu Ketua Umum menjadi sangat penting untuk melihat pemikiran Islam yang dominan berkembang di MUI pada periode 1975-1998. Hal tersebut perlu dilakukan karena MUI bukanlah lembaga individu, tetapi lembaga musyawarah, yang semua keputusan serta kebijakan yang lahir dari MUI, telah melalui proses musyawarah dari para ulama yang duduk disana. Permasalahan-permasalahan di atas sangat menarik untuk dikaji, sehingga penulis merumuskan permasalahan di atas dalam suatu judul **“Peranan Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru“ (Kajian Perbandingan Kepemimpinan MUI dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Tahun 1975-1998).**

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Rumusan masalah dari Skripsi ini adalah *“Bagaimana perbandingan kepemimpinan MUI dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan-permasalahan sosial politik pada masa Orde Baru?”*

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka rumusan masalah di atas harus dibatasi dengan beberapa pembatasan masalah. Pembatasan masalah dituangkan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan sosial budaya dan politik yang membentuk karakter dan gaya kepemimpinan Hamka, Syukri Ghozali, dan Hasan Basri sebelum memimpin MUI?

2. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Hamka, Syukri Ghozali dan Hasan Basri di Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975-1998 dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan-permasalahan sosial politik pada masa Orde Baru ?
3. Bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan Ketua Umum MUI pada masa Hamka, Syukri Ghozali, dan Hasan Basri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan-permasalahan sosial politik pada masa Orde Baru ?
4. Bagaimana pengaruh atau dampak gaya kepemimpinan Ketua Umum MUI pada Pemerintah Orde Baru dan masyarakat?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk:

1. Menjelaskan latar belakang Hamka, Syukri Ghozali, dan Hasan Basri yang meliputi kehidupan masa muda, latar belakang sosial budaya, serta aktivitas mereka sebelum menjabat sebagai Ketua Umum MUI, serta menganalisis tujuan dari pembentukan MUI oleh pemerintah Orde Baru yang dihubungkan dengan kondisi sosial politik Indonesia pada awal pemerintah Orde Baru .
2. Menganalisis peranan Hamka, Syukri Ghozali, dan Hasan Basri dalam pembentukan dan pengembangan MUI dari tahun 1975 hingga tahun 1998 yang meliputi: proses konsolidasi dan perumusan visi dan misi organisasi, proses memperjelas posisi organisasi baik dimata pemerintah maupun

masyarakat, dan upaya memecahkan berbagai permasalahan sosial politik yang dialaminya.

3. Membandingkan gaya kepemimpinan Ketua Umum MUI pada masa Hamka, Syukri Ghozali, dan Hasan Basri dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan sosial politik yang dialami oleh MUI yang meliputi: strategi pengembangan organisasi, fatwa-fatwa, dan hubungan MUI dengan masyarakat serta pemerintah.
4. Menganalisis pengaruh dari karakter dan gaya kepemimpinan dari Hamka, Syukri Ghozali, dan Hasan Basri pada perkembangan sosial politik masyarakat Indonesia serta pada proses perkembangan hubungan MUI dan Pemerintah Orde Baru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penyusunan Skripsi ini adalah untuk:

1. Memperkaya penulisan sejarah tentang lembaga MUI.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian sejarah mengenai hubungan Islam dan negara di Indonesia.
3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penulisan sejarah melalui pendekatan psikologi.

E. Penjelasan Judul

Untuk memperjelas kajian dari penelitian ini, di bawah ini akan terlebih dahulu diungkapkan beberapa definisi untuk menjelaskan judul skripsi.

1. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 854), Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang pada suatu peristiwa. Soekanto dalam buku *Pengantar Ilmu Sosiologi* (2003: 243) mendefinisikan peranan sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan adalah tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
2. MUI menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 699) adalah lembaga masyarakat nonpemerintah yang terdiri atas para ulama Islam, yang bertugas antara lain untuk memberikan fatwa.
3. Orde Baru menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 802) adalah tata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia, berlangsung sejak 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998.
4. Perbandingan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 1000) adalah perbedaan dan persamaan.
5. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 824) kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal memimpin. Soekanto dalam buku *Pengantar Ilmu Sosiologi* (2003: 288) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan dari

pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu bertingkahtaku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

6. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001: 698) majelis mempunyai definisi: *pertama*, dewan yang mempunyai tugas tertentu. *Kedua*, pertemuan (perkumpulan) orang banyak, rapat, perhimpunan.

F. Metode dan Teknik Penulisan

Pengkajian perbandingan kepemimpinan MUI dalam menghadapi masalah sosial politik Pada Masa Orde Baru` 1975-1998 menggunakan metode historis. Louis Gottschalk (1986:32) mendefinisikan metode historis sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode ini berusaha menggali, menilai dan menafsirkan fakta-fakta masa lampau untuk kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan mengenai peristiwa tersebut. Menurut Wood Gray (Heliussyamsudin,1996: 69) ada enam tahap yang harus ditempuh yang akan dilakukan penulis dalam penelitian sejarah ini, yaitu :

1. Memilih topik yang sesuai.
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik.
3. Membuat catatan yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika sedang mengadakan penelitian.
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber).
5. Menyusun hasil-hasil penelitian sejarah (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti.

6. Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

Helius Syamsudin (1996: 69) memasukan langkah-langkah di atas yaitu point 1, 2 dan 3 ke dalam langkah Heuristik. Heuristik yaitu tahap mencari dan mengumpulkan fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang relevan dengan judul yang dikaji penulis. Sebelum melakukan upaya pencarian sumber, maka terlebih dahulu harus ditentukan dulu topik dan judul dari penelitian ini.

Setelah pemilihan topik, maka pada tahap Heuristik ini harus ditentukan sumber macam apa yang akan digunakan, di mana sumber itu didapatkan dan cara untuk menemukan sumber itu. Sumber sejarah primer yang bisa digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini adalah berupa buku-buku karangan Hamka yang berjumlah 115 buah, tulisan-tulisan Hasan Basri, Syukri Ghazali di koran dan majalah, meskipun untuk tujuan penelitian ini tidak semua buku dapat digunakan, yang digunakan sebagian besar adalah buku atau tulisan baik di Buku dan surat kabar ketika mereka menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Selain itu, arsip-arsip yang berisi surat-surat keputusan atau fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1975-1998 bisa digunakan sebagai sumber sejarah primer tentang kebijakan-kebijakan MUI. Keputusan pemerintah melalui Menteri Agama yang dikeluarkan dalam rentang waktu 1975-1998 perlu digunakan untuk mengetahui reaksi dari pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan MUI. Sumber sekunder yang dapat digunakan adalah buku-buku yang mengkaji lembaga MUI dan wawancara dengan keluarga dan rekan Hamka, Hasan Basri,

Syukri Ghazali di MUI, seperti Miftah Farid, Kholil Ridwan, para pengurus pusat Muhammadiyah dan NU dan beberapa ulama senior lainnya. Sumber-sumber sejarah itu dapat ditemukan baik di perpustakaan yang ada di kota Bandung (UPI, IAIN. UNISBA, Perpustakaan Daerah) maupun di MUI pusat dan daerah (MUI Jawa Barat) dan kantor Departemen Agama RI di Jakarta. Cara memperolehnya yaitu dengan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan tersebut, mendatangi kantor MUI di Bandung dan Jakarta untuk mengadakan wawancara dan mencari sumber tertulis. Selain itu, penulis akan menggunakan disertasi dari Muhammad Athon Mudzhar yang meneliti Fatwa-fatwa MUI dari tahun 1975-1988 serta dampaknya bagi masyarakat dan pemerintah. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam Skripsi ini adalah studi literatur dan wawancara. Sumber-sumber tersebut jika diringkas dapat berupa :

- a. Evidensi tertulis seperti buku karangan Hamka, Hasan Basri, Syukri Ghazali buku tentang pemikiran Hamka, surat keputusan di MUI dan Depag, surat-surat pribadi Hamka Hasan Basri, Syukri Ghazali .
- b. Perilaku, sumber ini dapat digali dengan teknik wawancara maupun studi literatur. dengan beberapa orang yang memahami apa yang dipikirkan dan dilakukan Hamka, Hasan Basri, Syukri Ghazali

Kegiatan-kegiatan tersebut masih berupa perencanaan, sementara hal-hal yang telah dilakukan saat ini adalah membaca literatur yang berhubungan dengan Hamka, Hasan Basri, Syukri Ghazali maupun tulisan tentang lembaga MUI itu sendiri. Buku-buku tersebut telah didapatkan beberapa buah setelah penulis mengadakan heuristik. Sampai saat ini penulis masih banyak menemui kesulitan

untuk menemukan buku-buku karangan Hamka, apalagi tulisan dari Hasan Basri, Syukri Ghazali yang terdapat di surat kabar. Dengan demikian, kajian skripsi ini tidak akan berhasil jika mengandalkan kajian buku, perlu didukung oleh sumber lisan. Sementara untuk lebih memperdalam peranan Hamka, Hasan Basri, Syukri Ghazali di MUI, maka teknik wawancara dengan tokoh-tokoh MUI, Ormas Islam dan beberapa Pakar merupakan cara yang digunakan oleh penulis. Para tokoh-tokoh MUI yang diwawancarai adalah KH. Miftah farid dan Drs. KH. Hafidz Usman, para tokoh ormas yang akan diwawancarai antara lain para pakar seperti Prof. Dr. Achmad Sanusi M.Ed dan Prof. Dr. Atjep Dzauli.

Setelah proses pemilihan topik dan heuristik dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dilakukan. Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian mendalam terhadap sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan. Penelaahan lebih dalam untuk mengetahui gaya kepemimpinan serta pandangan-pandangan Hamka, Hasan Basri, Syukri Ghazali dalam buku-buku karangannya maupun tulisan-tulisan dari berbagai pakar yang menulis tentang mereka. Dengan demikian, kita akan memahami pemikiran Hamka, Hasan Basri, Syukri Ghazali dari sumbernya langsung. Kritik intern terhadap arsip-arsip MUI dan Depag dilakukan dengan melihat keaslian dari dokumen itu. Wawancara dengan tokoh-tokoh MUI baik yang seangkatan dengan Hamka maupun yang tidak, bisa dijadikan bahan *crosscek* terhadap arsip-arsip dari MUI itu.

Setelah melakukan tahapan kritik sumber maka langkah selanjutnya adalah tahapan intepretasi dan penulisan sejararah (hitoriografi). Sebagaimana yang

dikatakan oleh Helius Sjamsudin (1996: 153), tahapan penulisan dan interpretasi sejarah bukan merupakan kegiatan terpisah melainkan kegiatan yang bersamaan. Namun, uraian yang dipisahkan di bawah ini merupakan cara agar penjelasannya mudah dipahami.

Pada tahap Interpretasi penulis mencoba menafsirkan data-data yang diperoleh selama penelitian. Penafsiran terhadap data-data dalam kajian Perbandingan Kepemimpinan MUI dalam menghadapi masalah sosial politik Pada Masa Orde Baru 1975-1998 menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan interdisipliner dengan menggunakan pendekatan historis yang didukung dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi (memahami konsep, generalisasi dan teori-teori tentang modernisasi, reaktualisasi, westernisasi dan sekularisasi), dan psikologi (memahami kepribadian Hamka), psikologi sosial dan pendekatan ilmu manajemen organisasi.

Setelah melakukan proses penafsiran terhadap berbagai informasi dari sumber-sumber sejarah, maka penulis mencoba menganalisis, menafsirkan sumber-sumber sejarah yang ditemukan untuk kemudian ditulis menjadi suatu kisah sejarah yang ilmiah dalam bentuk skripsi dengan gaya bahasa yang sederhana dan tata bahasa dengan menggunakan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penafsiran dari tulisan ini bersifat penafsiran orang besar dalam arti, bahwa sosok individu (dalam hal ini Ketua Umum MUI) menjadi penyebab utama dalam perkembangan MUI.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang Hamka, Syukri Ghozali, Hasan Basri dan berdirinya MUI serta permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia, perumusan dan pembatasan masalah yang mencoba mengambil beberapa permasalahan yang layak dan penting untuk di kaji dalam skripsi ini, tujuan dan manfaat penelitian yang memuat maksud-maksud dari pemilihan masalah tersebut, tinjauan pustaka dan landasan teoritis yang berusaha mencari kerangka berpikir dalam melihat permasalahan yang dikaji dari skripsi ini, metode penelitian yang dijadikan standar baku dalam menuliskan sejarah yang hendak dikaji, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis. Bab ini mencoba menguraikan tentang teori-teori dalam memahami karakter dan corak pemikiran Hamka, Syukri Ghozali, Hasan Basri yang dihubungkan dengan konteks sosial budaya dan perjalanan sejarah hidupnya, teori-teori kepemimpinan dan manajemen organisasi, serta teori-teori tentang peranan Ulama dalam kehidupan sosial, politik dan budaya serta beberapa pandangan Pakar tentang keberadaan MUI.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Heuristik yaitu proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, Kritik yaitu proses pengolahan data sejarah sehingga menjadi fakta yang reliabel

dan otentik, intepretasi yaitu penafsiran sejarawan terhadap fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan dan metode penafsiran tertentu, serta historiografi yaitu proses penulisan fakta-fakta sejarah itu agar dapat dinikmati dan dikomunikasikan pada orang banyak. Selain menjelaskan metode historis dalam penulisan skripsi ini, disampaikan pula beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan manajemen kepemimpinan dan organisasi, psikologi sosial

Bab IV berisi pembahasan. Bab ini mencoba menguraikan. latar belakang kehidupan sosial budaya yang membentuk karakter dan corak pemikiran Islam Hamka, Syukri Ghozali, Hasan Basri, latar belakang situasi sosial politik Indonesia serta keterlibatan Hamka, Syukri Ghozali, Hasan Basri pada proses pembentukan MUI, Langkah-langkah yang dilakukan Hamka, Syukri Ghozali, Hasan Basri di Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975-1998 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI serta perbandingan pola pengelolaan organisasi MUI pada masa kepemimpinan Hamka, Syukri Ghozali, Hasan Basri yang dihubungkan dengan tuntutan dan tantangan dari Umat Islam dan Pemerintah Orde Baru.

Bab V merupakan kesimpulan. Bab ini mencoba menguraikan hasil-hasil temuan dan pandangan penulis tentang perbandingan Kepemimpinan MUI di bawah Hamka, Syukri Ghozali, Hasan Basri pada masa Orde Baru 1975-1998.

